

ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENDUKUNG PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI¹

Achmad Sani Alhusain²

Abstrack

Regional autonomy gives strategic role for regional government to create policies which can promote economic growth through potential industrial sectors. This research divulges various policies introduced by the government of the Riau Archipelago Province to enhance the development of its potential industrial sectors. The province has been chosen as locus of the research due to its importance role in industrialization, where the Batam special economic zone located. By gathering information through interviews and using qualitative method, the research findings indicated that the regional government has made policies which has supported the development of its potential industrial sectors. Some examples of them are the creation of training centers, inexpensive housing compounds and apartments for workers, simpler process of business permit, increasing power supply and improving infrastructure condition to support the mobility of good and people.

Keywords: regional government policy, industrial sector, the Riau Archipelago Province

Abstrak

Otonomi daerah telah memberikan peran yang sangat strategis bagi Pemerintahan daerah untuk melahirkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya melalui potensi sektor industri. Untuk mengetahui apa saja kebijakan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan

¹ Tulisan ini adalah hasil penelitian lapangan pada tahun 2010.

² Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI. Email: sani_alhusain@yahoo.com

metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah membuat kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor industri di daerahnya, antara lain: membuat balai latihan kerja, menyediakan fasilitas penunjang bagi pegawai berupa pembangunan rusun dan apartemen, mempersingkat proses perizinan baik untuk keluar masuk barang maupun tenaga kerja asing, berupaya terus untuk meningkatkan kapasitas energi listrik dan membangun sarana transportasi darat untuk mempercepat mobilisasi baik orang maupun barang.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, sektor industri, Provinsi Riau Kepulauan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini tidak dapat serta merta diperoleh tanpa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung pada banyak faktor dimana salah satunya adalah lahirnya kebijakan pemerintah daerah itu yang dapat menjadi stimulus perekonomian. Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan daerah yang pada akhirnya dapat merumuskan suatu kebijakan yang dapat mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Kewenangan daerah (otonomi daerah) dalam menentukan arah pembangunan menjadi sangat dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonominya seiring dengan berlakunya UU No. 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah atas dasar kemauan, pemikiran dan keterlibatan aktif masyarakat untuk memajukan daerahnya. Salah satu upaya menuju kemandirian daerah adalah memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki.

Terkait dengan otonomi daerah ini, khususnya Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran yang cukup strategis terkait dengan pertumbuhan

ekonomi melalui potensi daerahnya berupa pengembangan sektor industri yang telah dimulai sejak pengembangan Batam menjadi daerah industri di wilayah barat Indonesia. Kewenangan yang besar ini, ditambah dengan diberlakukannya beberapa wilayah Kepulauan Riau menjadi daerah perdagangan bebas (FTZ) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Januari 2008, kemudian didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Peraturan-peraturan Menteri keuangan sebagai acuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03./2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini dapat mendorong konsolidasi pembangunan sektor primer, sekunder, dan tersier termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan klaster industri di daerah ini. Melalui pemberlakuan aturan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horizontal) maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus dijalankan dengan baik dan seimbang. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan representasi dari aspirasi masyarakat. Sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak.

Pada skala nasional, untuk meningkatkan perkembangan sektor industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri manufaktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) selama

periode 2010-2014 mencapai 6,79 persen per tahun. Target tersebut, lebih rendah dibandingkan dengan RPJM periode 2004-2009 yang sebesar 8,15 persen. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin menjelaskan, target tersebut telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian Indonesia selama lima tahun mendatang.³

Potensi industri Indonesia perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha sehingga terbangun keterkaitan hulu dan hilir yang menjadikan industri Indonesia punya daya saing kuat di kompetisi global. Pembangunan perekonomian tidak bisa dilakukan secara meluas tanpa sinergi kekuatan. Prioritas Pembangunan Sektor Unggulan khususnya industri akan mendorong sinergi segenap potensi perekonomian nasional. Membangun daya saing internasional industri Indonesia perlu diawali dengan memperkuat daya saingnya di pasar domestik melalui perkuatan pelaku usaha industri dalam negeri dan menyediakan iklim usaha yang kondusif. Perkuatan daya saing di pasar domestik memerlukan keterlibatan pelaku usaha, pemerintah, konsumen dan masyarakat Indonesia.

Kadin dalam Laporan Ekonomi Bulanan Januari 2008 menyebutkan bahwa buruknya sarana infrastruktur jalan raya, pelabuhan, dan terbatasnya pasokan energi dan listrik dalam negeri saat ini akan menjadi penghambat yang sangat berpengaruh pada kelancaran kegiatan sektor produksi ril. Sektor industri manufaktur, yang pernah menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sampai dewasa ini belum menunjukkan kebangkitannya kembali. Sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, kebijakan di sektor ini semakin jauh dari arah yang jelas. Ketidakjelasan visi dan misi sektor industri menyebabkan sektor ini semakin jauh dari perkembangan yang memadai. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan sektor industri tidak lagi pernah melebihi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, seperti yang dicapai di masa sebelum krisis tahun 1997. Kenaikan harga minyak bumi dan energi memang berdampak langsung kepada sektor industri manufaktur, karena meningkatnya biaya produksi sektor ini. Namun yang juga berperan penting terhadap terjadinya de-industrialisasi di Indonesia adalah karena ketidakjelasan strategi dan kebijakan industri.⁴

Perkembangan nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB setelah 4(empat) tahun otonomi daerah diimplementasikan ternyata belum dapat membawa perbaikan yang signifikan. Perkembangan nilai kontribusi industri

³ Pertumbuhan Industri dalam RPJM Ditargetkan Capai 6,79%, http://www.depperin.go.id/ind/publikasi/berita_psb/2010/20102989.HTM. Diakses pada tanggal 18 Maret 2010.

⁴ Laporan Ekonomi Bulanan Januari 2008, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Hal 6 – 7.

terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia selama periode 2001 – 2004 menunjukkan kecenderungan penurunan. Jika pada periode 1993 – 2000 beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan nilai kontribusi sektor industri di atas 20 persen, maka pada periode 2001 – 2004 hampir seluruh daerah memiliki nilai kontribusi terhadap PDRB yang menurun secara signifikan. Di pulau Sumatera, misalnya provinsi yang mampu mempertahankan nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB di atas 20 persen hanya terdiri dari 2 (dua) provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara dan Riau.⁵

Dari latar belakang dan permasalahan di atas, menarik untuk menganalisa kebijakan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri di daerahnya.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2008 terus mengalami kenaikan. Untuk menjaga dan meningkatkan investasi ini, pemerintah daerah harus dapat melahirkan suatu kebijakan yang selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Disamping itu, kebijakan yang dilahirkan tersebut harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan insentif bagi perkembangan investasi sektor industri.

Di lain pihak, sektor industri sangat menunggu dukungan kebijakan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelaku industri. Hal yang menjadi sorotan pelaku industri adalah kebijakan yang dapat menjawab permasalahan birokrasi perizinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang tidak memadai, banyaknya barang impor ilegal yang beredar di pasar domestik, permasalahan hubungan industrial dalam perburuhan, belum adanya kepastian hukum, dan suku bunga perbankan yang masih tinggi.⁶

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri di atas, tentunya menarik untuk diteliti apa upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perkembangan sektor industri. Oleh karena itu, pertanyaan besar yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Firdausy. Carunia Mulya, *Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*, elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/.../downloadDataById/8198/8198.pdf, Diakses pada tanggal 15 Maret 2010

⁶ BAB 18 Daya Saing Industri Manufaktur hal 1-2. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8418/. Diakses pada tanggal 12 Maret 2010.

1. Bagaimana potensi sektor industri Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi sektor industri Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui apa kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan Sektor Industri.

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi awal bagi Anggota DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Kartasapoetra (2000), Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri.⁷ Pengertian industri ini sesuai dengan pengertian industri yang tercantum dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Dalam undang-undang tersebut ditambahkan bahwa Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.

Menurut Hasibuan (2000) pengertian industri sangat luas, dapat dalam lingkup makro maupun mikro. Mikro Industri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat yang saling mengganti sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan yakni cenderung bersifat makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Jadi batasan industri yaitu secara mikro sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang sedangkan secara makro dapat membentuk pendapatan.⁸

⁷ Kartasapoetra G, (2000). "Makro Ekonomi", Edisi Kedua, Cetakan Keempat Belas. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 40.

⁸ Hasibuan, Nurimansyah, (2000). "Ekonomi Industri, Persaingan, Monopoli dan Regulasi". LP3ES, Jakarta, hal 62.

Selanjutnya Undang-undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juga menjelaskan bahwa rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan pendirian industri atau pabrik-pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Sedangkan perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin atau peralatan pabrik atau peralatan industri lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa suatu perusahaan industri akan menghasilkan produk-produk tertentu yang memiliki ciri khas perusahaan, demi untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Untuk perlindungan terhadap hak-hak perusahaan yang bersangkutan, maka produk yang dihasilkan dari industri mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, dalam usaha mendirikan perusahaan industri tidak terlepas dari pengawasan pemerintah.

Pembangunan industri adalah bagian dari program pembangunan jangka panjang untuk merubah struktur perekonomian yang terlalu berat sebelah kepada bahan mentah dan hasil pertanian, kearah struktur ekonomi yang lebih seimbang dan lebih serasi. Artinya perusahaan industri tidak dapat berkembang sendiri tanpa adanya persaingan dari perusahaan lainnya. Misalnya suatu perusahaan industri pengolahan ikan tidak akan berkembang kalau usaha ekstratif perikanan itu menurun. Demikian juga dengan perusahaan industri pengalengan ikan, di mana jika perusahaan ekstratif perikanan meningkat maka usaha pengalengan ikan juga akan meningkat. Namun sebaliknya apabila perusahaan perdagangan yang dapat memasarkan produknya tidak berkembang, maka pertumbuhan industri pengolahan ikan tersebut tidak akan berkembang.

Menurut Martin dalam Kartasapoetra (2000) industri merupakan kumpulan dari berbagai perusahaan (*firm*) yang memproduksi:⁹

- a. Bahan mentah yang sama.
- b. Proses produksi yang sama.
- c. Hasil yang sama.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) industri mempunyai dua pengertian:¹⁰

- a. Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan di bidang ekonomi bersifat produktif.
- b. Dalam pengertian secara sempit, industri hanyalah mencakup industri

⁹ Kartasapoetra G, (2000), *Op.Cit.*

¹⁰ Badan Pusat Statistik, (2008). "Publikasi Kriteria Industri Kecil", Provinsi Sumatera Utara.

pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, kemudian barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar negeri, dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya *margin* keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, dan sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.¹¹

Adapun strategi pengembangan industri Indonesia ke depan adalah dengan mengadaptasi pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, sehubungan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi abad 21, yaitu pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster dalam konteks membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Pada dasarnya klaster industri adalah upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan, baik dengan industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan lembaga terkait. Manfaat klaster ini selain untuk mengurangi biaya transportasi dan transaksi, juga untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan asset secara kolektif, dan mendorong terciptanya inovasi.¹²

Untuk menentukan industri yang prospektif, dilakukan pengukuran daya saing, baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan; untuk melihat kemampuannya bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil analisis daya saing terhadap industri yang sudah berkembang di Indonesia, dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu produksi orientasi ekspor dan

¹¹ Ringkasan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, <http://www.depperin.go.id/kebijakan/03KPIN-Ringkasan.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2010.

¹² *Ibid.*

produksi orientasi dalam negeri, yang selanjutnya dibedakan atas 4 kategori yaitu: Industri Padat Sumber Daya Alam, Industri Padat Tenaga Kerja, Industri Padat Modal, dan Industri Padat Teknologi.¹³

Dalam menentukan bangun industri yang dicita-citakan, industri-industri terpilih tersebut, yang didasarkan atas industri yang sudah ada, dilengkapi lagi dengan industri-industri lainnya yang dipilih berdasarkan pertimbangan atas besarnya potensi Indonesia, yaitu luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam, yang bisa didayagunakan untuk kepentingan pembangunan sektor industri.¹⁴

Basis Industri Manufaktur, adalah kelompok industri yang telah berkembang saat ini. Industri kelompok ini yang keberadaannya sangat bergantung pada ketersediaan SDA dan SDM yang tidak terampil, untuk ke depan perlu direstrukturisasi dan diperkuat kemampuannya sehingga mampu menjadi industri kelas dunia. Penentuan industri prioritas, dilakukan melalui analisis daya saing internasional dan pertimbangan besarnya potensi Indonesia yang dapat digunakan dalam rangka menumbuhkan industri. Dalam jangka panjang pengembangan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster pada kelompok industri : 1) Industri Agro; 2) Industri Alat Angkut; 3) Industri Telematika; 4) Basis Industri Manufaktur; dan 5) Industri Kecil dan Menengah Tertentu.¹⁵

Selain pengembangan industri itu sendiri tentunya perlu dukungan pemerintah dalam memberikan stimulus perkembangan sektor industri baik itu dalam bentuk fasilitas insentif maupun sarana dalam bentuk ketersediaan infrastruktur yang mendukung. J. M. Keynes yang dipandang sebagai salah seorang tokoh terkemuka ekonomi pada bagian awal abad ke 20 menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumber daya dan *outputs* secara optimal (*full employment of outputs*). Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.¹⁶ Sejalan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumber daya yang optimal bagi kepentingan umum.¹⁷

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abidin, Said Zainal, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan, <http://www.stialan.ac.id/artikelSaidZaenal.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.

¹⁷ *Ibid.*

Peran pemerintah dalam pembangunan sangat penting, pertama dalam pengadaan dan pengaturan pemanfaatan barang-barang publik dan proyek-proyek pionir. Kedua, sebagai penjamin terselenggarakannya pembangunan sesuai dengan visi dan visi bangsa. Ketiga, untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil dan menengah.¹⁸

Tiap negara mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Maka itu pemerintah harus memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Munculnya negara-negara di Asia Timur dengan kemajuan yang mengagumkan membuktikan bahwa peran pemerintah yang terpadu dengan pihak swasta sangat efektif dalam pembangunan.¹⁹

Perox dalam Arsyad, mengemukakan sebuah teori Pusat Pertumbuhan (*Pole Growth*) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan industri daerah yang banyak terpakai di berbagai negara dewasa ini. Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori ini adalah adanya industri unggulan yang merupakan penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya timbul daerah yang relatif maju akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.²⁰

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian lapangan dilakukan pada tanggal 2 – 8 Mei 2010. Adapun daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Riau. Alasan dipilihnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penelitian adalah karena Provinsi ini merupakan daerah yang dikembangkan sebagian besar khusus untuk industri. Oleh karena itu sangat menarik untuk menggali perkembangan perindustrian yang ada saat ini dan menganalisa kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lincolyn Arsyad (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE, hal 83.

2. Bahan dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam guna memperoleh keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang mengetahui pasti dan berhubungan erat dengan masalah perindustrian. Adapun pihak yang akan menjadi subjek penelitian adalah pejabat pada instansi pemerintah daerah terkait antara lain Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mengetahui rencana prioritas pembangunan daerah khususnya yang berhubungan dengan pengembangan perindustrian, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk mengetahui kontribusi industri daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pihak yang akan dijadikan obyek dalam penelitian adalah perwakilan pengusaha yang bernaung pada Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) yang untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku usaha industri atas kebijakan pemerintah dalam sektor industri.

Dari hasil wawancara, dianalisa sejauh mana kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku, internet dan data-data angka yang diperoleh Badan Pusat Statistik.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis dengan mendasarkan pada data primer dan sekunder, yang kemudian dari hasil pembahasan diambil kesimpulan dan rekomendasi.

II. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Sektor industri

1. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang termuda di Indonesia terletak di jalur perlintasan dunia yang memiliki potensi ekonomi sangat

besar. Secara geografis, Provinsi ini sangat strategis karena berada pada pintu masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia.²¹

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil di mana 40% belum bernama dan berpenduduk.

Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat. Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai *pilot project* pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama dengan Pemerintah Singapura.²²

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari kawasan sejenis di Asia-Pasifik.

Dalam memberdayakan berbagai potensi yang ada, Provinsi Kepulauan Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penerapan *good governance* dan *clean government* dengan memberikan kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.

²¹ Website Resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. www.kepriprov.go.id. Diakses pada tanggal 20 Juni 2011

²² *Ibid.*

2. Perekonomian Daerah

Perekonomian Kepulauan Riau di awal tahun 2010 semakin memperlihatkan tren ekspansif. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di triwulan I-2010 sebesar 9,34% (*year-on-year*), yang merupakan level pertumbuhan tertinggi sejak terbentuknya provinsi ini di tahun 2002. Dampak krisis keuangan global terhadap kinerja ekspor industri manufaktur berlangsung lebih *smooth* dari perkiraan semula. Realisasi ekspor di periode ini mencatat kenaikan secara tajam setelah sepanjang tahun 2009 lalu tumbuh negatif. Perkembangan ekonomi eksternal dan domestik yang kian kondusif juga mendorong kegiatan investasi, terutama di sektor manufaktur seperti industri pembuatan/perbaikan kapal, industri mesin-mesin elektrik dan industri barang-barang logam. Sementara di sisi penawaran juga ditandai dengan semakin membaiknya pertumbuhan sektor-sektor utama lain, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor bangunan.²³ Tingkat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau di triwulan II-2010 diprakirakan masih ekspansif di kisaran $9,38 \pm 1\%$ (*year-on-year*). Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2010 yang dialami beberapa negara seperti Singapura, Hongkong, Amerika, dan Jepang akan lebih berdampak positif terhadap kinerja sektor industri pengolahan Kepulauan Riau yang diperkirakan tumbuh 10,01% di triwulan I-2010. Pengaruhnya akan konvergen dengan kinerja ekspor yang diprediksi semakin tumbuh membaik di triwulan II-2010. Selain itu, laju pertumbuhan yang tinggi juga ditopang oleh perbaikan kinerja konsumsi swasta menjelang pilkada Gubernur Kepulauan Riau yang direncanakan pada bulan Mei 2010.

Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau 2009 - 2010

INDIKATOR	Tw. I 2009	Tw. II 2009	Tw. III 2009	Tw. IV 2009	Tw. I 2010
PDRB - harga konstan (Rp Miliar)	9.213	9.463	9.694	9.954	10.073
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	0,53%	2,26%	3,50%	7,74%	9,34%
Laju Inflasi Tahunan (yoy %) Kota Batam	6,33%	2,52%	2,57%	1,88%	2,97%

Sumber: Bank Indonesia, 2010

²³ BI, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I/2010, http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional/KER/KepRiau/ker_kepriau_tw110.htm, Diakses pada tanggal 9 Juli 2010.

APBD yang ditetapkan pada tahun 2010 ini hanya Rp 1,8 Triliun, namun kegiatan perekonomian barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai Rp 63 Triliun. Ini artinya partisipasi masyarakat di semua sektor jauh mengungguli peran pemerintah. APBD hanya 1,8 Triliun, tapi kegiatan perekonomian barang dan jasa, yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai 63, Triliun tahun 2009, ini berarti sektor swasta sangat berkembang pesat di Kepulauan Riau.²⁴

Keberhasilan Kepulauan Riau di beberapa bidang ini tidak terlepas progresivitas peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mampu mendesain program untuk menopang laju pertumbuhan pembangunan. Komposisi perekonomian di Kepulauan Riau adalah industri, perdagangan, dan pariwisata, namun untuk penyumbangan PDRB sektor industri masih mendominasi dengan persentase 45,5 persen. Kemudian sektor perdagangan, letak geografis Kepri yang berada di Selat Malaka dan berdekatan dengan negara Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja, membuat wilayah kepulauan ini menjadi terminal teramai kedua setelah daerah kepulauan Swets. Sementara itu, sektor pertanian juga bergerak dengan baik. Pada tahun 2009 lalu sektor ini mampu menyumbang 5 persen dari PDRB Kepulauan Riau. Kontribusi masyarakat terbesar ada di sektor industri. Meskipun Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan, tapi industri maritim berperan mencapai 45,5 persen, dari pada penyumbangan PDRB. Sementara sektor pertanian juga bergerak dengan menyumbang sekitar 5 Persen. Ini adalah komposisi perekonomian kami.²⁵ Laju inflasi juga berada dibawa nasional, pada tahun 2008 lalu, inflasi nasional mencapai 8,17 sementara di Kepulauan Riau hanya 2,41. Jadi laju inflasi mampu ditekan rata-rata dari inflasi secara nasional. Kepulauan Riau memiliki 19 pulau terluar atau terdepan yang menjadi kawasan strategis nasional ini artinya pulau-pulau tersebut berbatasan berhadapan dengan negara-negara tetangga. Pulau Batam, Bintang dan Karimun telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas.²⁶

Kepulauan Riau juga merupakan daerah multi etnis, dan tidak ada nilai diskriminasi yang dibangun, semua etnis dipandang sama oleh anak-anak Melayu. Yang membedakan mereka hanya kualitas, untuk mengembangkan Kepulauan Riau sebagai satu wilayah yang maju. Bahkan bukan cuma dari anak-anak Indonesia, banyak penduduk asing yang menetap di Kepulauan Riau untuk menyambung hidup.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

3. Potensi Sektor Industri

Industri manufaktur yang berskala kecil sampai sedang dan industri besar, terutama industri perkapalan, agroindustri dan perikanan. Saat ini industri yang paling banyak di Kepulauan Riau adalah industri elektronik seperti PCB, komponen komputer, peralatan audio dan video dan bagian otomotif. Industri ringan lainnya seperti industri barang-barang, garmen, mainan anak-anak, peralatan rumah tangga. Industri lainnya fabrikasi baja, penguliran pipa, peralatan eksplorasi minyak, pra-fabrikasi minyak, jacket lepas pantai dan alat berat terdapat di Bintan, Batam dan Karimun.²⁷

Sementara itu, industri kelautan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya adalah Industri pembuatan dan perawatan kapal serta Industri penunjang kegiatan perkapalan. Di samping itu, kegiatan perdagangan di Kepulauan Riau difokuskan pada ekspor dan impor dengan total nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau menurut negara tujuan pada tahun 2009 mencapai USD 8.330 milyar dan total nilai impor menurut negara asal barang pada tahun 2009 mencapai USD 9.158 milyar yang berasal dari kegiatan ekspor ke 121 negara dan kegiatan impor dari 133 negara. Pada tahun 2009 ini total impor melebihi total ekspor.²⁸

Selanjutnya, total nilai investasi di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dari tahun 2005 – 2009 mencapai Rp.365.488.993.875,- dan US\$729.469.7171,-. Nilai investasi ini belum menggembirakan mengingat fasilitas kebijakan yang diberikan khusus untuk daerah ini.²⁹

Sebagai Provinsi Kepulauan, wilayah ini terdiri atas 96 % lautan. Kondisi ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan mulai usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan. Di Kabupaten Karimun terdapat budidaya Ikan kakap, budidaya rumput laut, kerambah jaring apung. Kota Batam, Kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat Kabupaten tersebut, juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di kota Batam tepatnya di Pulau Setoko, bahkan terdapat pusat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1 juta benih setahunnya.

²⁷ Website Resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. www.kepriprov.go.id. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010

²⁸ Statistik Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

²⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Permodalan dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2010.

Minyak dan Gas Bumi terdapat di perairan Natuna (Kab. Natuna). Berdasarkan data dari hasil survey bahwa jumlah cadangan minyak bumi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 291.81 MMBO dan produksi rata-rata pertahun 16,121 MMBO, sedangkan jumlah cadangan gas sebesar 55,3 TSCF. Dari data ini terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam yang sangat strategis dan dapat menjadi daya tarik industri pengolahan minyak bumi dan gas.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kabupaten dan Kota. Pantai Melur dan Pantai Nongsa di Kota Batam, Pantai Belawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintang Leisure Park di Kabupaten Bintan. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti *snorkeling*. Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta *event-event* khas daerah. Dari potensi pariwisata ini, berbagai industri penunjang kebutuhan pariwisata dapat menjadi program strategis pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan kesempatan berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

B. Kebijakan Daerah dalam Mendukung Sektor Industri

Sebagai propinsi baru, berbagai permasalahan telah muncul yaitu permasalahan ketimpangan baik ketimpangan demografi, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Kota Batam sebagai maskot sekaligus juga magnet Kepulauan Riau, mempunyai persoalan jumlah penduduk yang cukup besar yang indikasinya dapat dilihat dari banyaknya rumah bermasalah, tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan sosial yang timpang

Badan Pusat Statistik menyatakan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 4,99 persen per tahun, tertinggi dibanding wilayah lain di Sumatra. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, laju pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau juga terbesar kedua di Indonesia setelah Papua. Jumlah penduduk di Kepri sebanyak 1.685.698 orang (864.333 pria dan 821.365 wanita), atau 0,7 persen dari total penduduk Indonesia. Kota Batam yang berada di Kepulauan Riau memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi dalam satu dasawarsa terakhir yaitu 7,70 persen per tahun. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk di Batam mempengaruhi Kepulauan Riau, karena

kabupaten/kota lainnya masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk tingkat provinsi.³⁰

Jumlah penduduk di Batam berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 949.775 orang, mengalami peningkatan pesat dibanding 10 tahun sebelumnya yang hanya mencapai 455.103 orang. Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang saat ini sebanyak 187.687 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,79 persen per tahun. Kabupaten Bintan berpenduduk sebanyak 142.382 orang dengan laju pertumbuhan 2,63 persen per tahun. Sementara penduduk Kabupaten Natuna sebanyak 69.319 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,79 orang. Kabupaten Kepulauan Anambas, berpenduduk 37.493 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,80 persen per tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun 212.812 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,21 persen per tahun. Jumlah penduduk di Karimun terbanyak kedua di Provinsi Kepri setelah Batam. Jumlah penduduk Kabupaten Lingga sebanyak 686,230 orang. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten itu di bawah angka nasional yaitu 0,83 persen per tahun. Penyebaran penduduk di Kepulauan Riau belum merata, karena masih terpusat di Kota Batam. Penduduk yang tinggal di Batam sebanyak 56,34 persen, sementara sisanya yang masing-masing kurang dari 13 persen tersebar di kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau.³¹

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III tahun 2009 terjadi peningkatan atau tumbuh sebesar 1,90 persen dibandingkan triwulan II tahun 2009. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 3,19 persen. PDRB Kepri pada triwulan III tahun 2009 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2008 (y on y) tumbuh sebesar 0,54 persen. Perekonomian Kepri yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan III tahun 2009 mencapai Rp 16.121.696,11 juta, sedangkan besaran PDRB triwulan III tahun 2009 atas dasar harga konstan 2000 adalah Rp 9.416.181,13 juta.³²

Disisi penggunaan secara riil, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2009 dibandingkan dengan triwulan II 2009 tumbuh sebesar 11,00 persen, pengeluaran lembaga swasta nirlaba tumbuh 9,96 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 9,58 persen, impor barang dan jasa

³⁰ Kepulauan Riau Dalam Angka, 2010, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

tumbuh 8,76 persen, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 5,58 persen, dan ekspor barang dan jasa tumbuh 0,60 persen.³³

Disamping itu juga, dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kepulauan Riau 48,1% sedangkan di Kota Batam hanya 24,1 % saja. Hal ini konsisten dengan kontribusi sektor Industri pengolahan diatas, di mana pada sektor industri pengolahan pekerjaanya bersifat formal, sedangkan sektor informal biasanya ditandai dengan sektor pertanian.

Dari data kuantitatif di atas, kita melihat bahwa memang telah terjadi ketimpangan-ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Permasalahannya untuk sementara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang memprioritaskan batam sebagai basis perekonomian seperti industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata dan juga dalam infrastruktur.

Secara garis besar, Arah Kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dirumuskan untuk tahun 2007 tidak secara langsung ditujukan untuk pengembangan sektor industri tetapi dirumuskan dalam program Pembangunan Infrastruktur Perekonomian, Pemerataan Pertumbuhan Antar Daerah dan Pengentasan Kemiskinan. Namun demikian dari program ini beberapa sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan upaya pengembangan sektor industri. Adapun Sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2007 antara lain: Meningkatnya ketersediaan utilitas (listrik, air, telepon, gas dan BBM); Tersedianya pelayanan transportasi darat, laut dan udara antar daerah; Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat, laut maupun udara; Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi bagi masyarakat; Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman; Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat; Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung lancarnya arus barang, jasa dan modal; Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru; dan Meningkatnya pengawasan terhadap pencurian SDA (hasil hutan, tambang, ikan dan lain-lain).³⁴

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran antara lain: Pembangunan dan peningkatan jalan; Perbaikan dan pembangunan pelabuhan laut; Penambahan frekuensi pelayanan di beberapa daerah yang selama ini masih

³³ *Ibid.*

³⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2010.

terbatas seperti Lingga, Natuna dan Tambelan; Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Bandara Kijang, Dabo, Karimun dan Ranai; Peningkatan penyediaan utilitas (listrik, air dan telekomunikasi); Pembangunan prasarana pengairan di Natuna, Lingga, Karimun dan Bintan; Pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan; Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman; Melaksanakan pendataan dan pengkajian potensi-potensi SDA; Mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat; Mendorong tumbuhnya lembaga – lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; Menyempurnakan manajemen pelayanan perizinan; Meningkatkan pengamanan SDA guna mengurangi tingkat pencurian dan perusakan; Memberikan dukungan terhadap perkuatan permodalan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; Meningkatkan kualitas SDM usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; Meningkatkan promosi produk UMKM dan koperasi; dan Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat desa.³⁵

Menyoroti perkembangan sektor industri, pengusaha yang tergabung dalam Kadinda Provinsi Kepulauan Riau menilai peran gubernur sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi provinsi ini terkait penetapan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas. Ditangan gubernur fungsi dan peran lembaga FTZ seperti Dewan Kawasan dan BP Kawasan bisa berjalan efektif dan optimal.³⁶

Ketua Kadinda Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa sejak FTZ diresmikan oleh Presiden SBY pada Januari 2008, kemudian diterbitkannya PP No. 2/2009 tentang aturan kepabeanan dan perpajakan dalam kawasan bebas, dan Peraturan Menkeu no. 45, 46, 47 tahun 2009, tidak melihat ada perkembangan berarti dalam kelanjutan implementasi FTZ di wilayah ini. Sangat disayangkan, peraturan yang diterbitkan pemerintah itu bertolak belakang dengan semangat FTZ yang diatur dalam UU FTZ. Hal ini terbukti sejak pemberlakuannya pada April 2009 sampai hari ini, masih banyak hambatan dalam arus keluar masuk barang di pelabuhan. Institusi kepabeanan sebagai penjaga pintu masuk masih sangat dominan dalam pelaksanaan FTZ ini sehingga mengaburkan fungsi dan tugas pokok dari dua lembaga yang mendapatkan amanah oleh undang-undang yaitu Dewan Kawasan FTZ dan Badan Pengusahaan Kawasan.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasil wawancara dengan Kadinda Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Mei 2010.

³⁷ *Ibid.*

Kadinda telah menyusun lima program prioritas yang harus diselesaikan oleh gubernur yang baru, yaitu masalah FTZ, pelabuhan, kelautan, pemukiman, dan transportasi umum. Kami menilai kelima program itu sangat mendesak untuk diselesaikan karena sangat berkaitan dengan iklim investasi dan citra daerah ini.³⁸

Pertama, masalah FTZ ada beberapa usulan yaitu 1) mengusulkan kepada gubernur agar mendesak pemerintah mengganti PP No. 2/2009 tentang aturan kepabeanaan dan perpajakan di kawasan perdagangan bebas, sebab disinilah muara dari semua masalah. 2) perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelimpahan kewenangan instansi-instansi pusat kepada Dewan Kawasan selaku regulator dalam implementasi FTZ di Batam Bintan Karimun. Merevisi Keppres No. 9, 10, 11 tahun 2008 tentang struktur keanggotaan Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun. 3) Perlu diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Mekanisme Pembentukan Dewan Kawasan FTZ dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ, berikut dengan Struktur Organisasi Tugas (SOT) dan *Standard Operating Procedure* (SOP)

Kedua, soal pelabuhan. Kadinda mengusulkan kepada gubernur agar ada ketegasan sikap dari Dewan Kawasan mengenai rencana BP Batam untuk mewujudkan pembangunan *container port* Batu Ampar dan penataan jangka pendek agar pelabuhan dapat dioperasikan secara optimal.

Program prioritas ketiga adalah soal pemukiman. Kadinda sangat peduli terhadap pemukiman ini karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dapat dilihat bahwa pemukiman liar yang tersebar luas di Pulau Batam seolah tidak tersentuh oleh pemangku kebijakan di pulau ini. Data yang Kadin himpun pada 2006 saja jumlah rumah liar sudah mencapai angka 57.000 unit di seluruh Batam, dan pada 2010 ini kami perkirakan sudah menyentuh angka 70.000 unit karena tim penyelesaian masalah sengketa lahan ini tidak bekerja efektif. Jika diasumsikan satu rumah ada tiga jiwa maka total penghuni rumah liar ini mencapai 210.000 jiwa atau 2% dari total 1 juta jiwa penduduk Batam. Kadin menilai ada diskriminasi antara pemukim liar dengan penduduk di kawasan legal. Mereka tidak bayar pajak, menempati atau menyerobot tanah negara, tapi mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga yang tinggal di rumah legal.

Kadinda mengusulkan bahwa perlu sikap tegas dari Gubernur mengenai penyelesaian permukiman liar serta menutup peluang pengurusan KTP,

³⁸ *Ibid.*

penyambungan air, listrik, dan lainnya di permukiman liar. Keberadaan rumah liar sudah mencoreng Batam sebagai kota investasi karena investor jadi takut untuk membebaskan lahan yang sudah diserobot oleh pemukim liar ini.

Keempat soal transportasi. Kadinda memandang perlu melebur seluruh taksi yang beroperasi di Batam dan Tanjung Pinang ke dalam satu perusahaan baru dengan mengundang investor taksi sekelas Blue Bird di Jakarta supaya memiliki standard pelayanan yang sama dengan kota besar lainnya. Pertimbangannya adalah kondisi pertaksian di Batam yang juga memprihatinkan. Ada argometer tapi tidak dipakai, tidak ada kepastian tarif, monopoli masih terjadi, dan tidak ada standar pelayanan. Akibat dari kondisi ini, orang jadi malas dan takut jika harus naik taksi dari bandara atau terminal ke kediamannya.

Selain 5 (lima) program prioritas yang diusulkan di atas, Kadinda berpendapat bahwa sektor kelautan juga sangat penting untuk diperhatikan karena 96% wilayah Kepulauan Riau ini terdiri dari laut sehingga sudah pasti ada banyak potensi kelautan yang bisa digarap dan menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Tapi harus diingat, persoalan utama dari kelautan ini adalah soal kewenangan bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan ini. Sepanjang daerah belum diberi kewenangan yang jelas, maka sulit bagi Kepulauan Riau mengembangkan diri.³⁹

Kadinda mengusulkan agar gubernur segera menginventarisasi kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan potensi kelautan di Kepulauan Riau, artinya di sektor apa saja yang boleh dan mana yang tidak boleh. Selanjutnya, segera menyusun program jangka pendek dan menengah dalam mengembangkan pelabuhan perikanan terpadu tempat tersedianya industri hulu dan hilir sebagai pusat industri dan jasa perikanan.⁴⁰

Biro Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa saat ini permintaan untuk berinvestasi di Kepulauan Riau meningkat hanya saja permintaan tersebut baru sebagian besar untuk di Batam dan Bintan sementara itu untuk Karimun belum begitu banyak. Namun usaha mempromosikan keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terus dilakukan. Tidak sampai disitu saja, pembangunan infrastruktur pun terus digalakkan meskipun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Terkait dengan kebijakan terhadap sektor industri, Biro Perekonomian mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan dukungannya dalam mengembangkan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

sektor industri yaitu melalui pendirian Balai Latihan Kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia daerah agar siap bekerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Provinsi ini.⁴¹

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Riau telah menimbulkan sejumlah persoalan. Persoalan yang timbul terutama masalah pemukiman dan transportasi darat. Untuk menunjang kebutuhan masyarakat terutama karyawan Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk dikembangkan sebagai penyediaan pemukiman berupa rusun dan apartemen. Disadari bahwa masalah pemukiman ini menjadi besar karena banyaknya masyarakat pendatang ke provinsi Riau khususnya di kota Batam. Dengan demikian, penyediaan lahan perumahan ini akan memudahkan karyawan atau masyarakat untuk memperoleh rumah susun atau apartemen dengan harga yang relatif murah dan pemberian subsidi kredit.⁴²

Selain persiapan SDM, Pemerintah provinsi juga sudah memprioritaskan pengembangan infrastruktur jalan raya agar terjamin kelancaran mobilitas kerja dan distribusi barang di darat. Untuk memperlancar proses produksi, pemerintah daerah juga sedang mengupayakan terus peningkatan kapasitas energi listrik baik untuk rumah tangga maupun untuk industri. Pada kenyataannya sebagian pelaku industri menengah dan besar yang ada di provinsi ini sudah menyadari keterbatasan kapasitas listrik ini sehingga mereka (pelaku industri) biasanya membangun fasilitas listrik sendiri.⁴³

Di lain Pihak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan sektor industri yang menjadi prioritas/unggulan untuk segera dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau. Di Batam, akan dikembangkan sektor industri Perkapalan dan elektronik. Di Natuna, akan dikembangkan sektor industri Perikanan, Perkebunan, Kerajinan dan Rumah Tangga. Di Karimun, akan dikembangkan sektor industri Pertambangan, Perkebunan, dan Perikanan. Di Bintan, akan dikembangkan sektor industri Periwisata, Garmen dan elektronik. Di Tanjungpinang, akan dikembangkan sektor industri Kerajinan. Di Lingga, akan dikembangkan sektor industri Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan. Dan di Kepulauan Anambas akan dikembangkan sektor industri Pengolahan Hasil Laut dan Perkebunan.⁴⁴

⁴¹ Hasil wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Mei 2010

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Mei 2010.

Untuk mencapai rencana pengembangan sektor industri tersebut, Pemerintah Daerah telah membuat suatu perencanaan berupa Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pengembangan Industri. Visi yang ingin dicapai adalah "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kawasan Industri Perdagangan serta tumbuhnya sentra-sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang mandiri, tangguh dan berorientasi pada pasar global. Misinya adalah menguatkan struktur industri dan memberdayakan potensi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan mendorong usaha ekonomi masyarakat guna mendukung perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan menjadikan Industri dan Perdagangan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah regional yang berkelanjutan, berdaya saing tinggi, berwawasan kerakyatan dan ramah lingkungan.⁴⁵

Arah Kebijakan Pengembangan Industri sendiri, yaitu: Meningkatkan kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mampu menunjang pertumbuhan industri antar wilayah; Meningkatkan dan mengembangkan keterkaitan antara industri hilir dan hulu, industri besar, menengah dan kecil; Mengembangkan industri berbasis sumber daya alam; Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan rumah tangga guna memperkuat struktur perekonomian daerah; Meningkatkan kegiatan kemitrologian; dan Meningkatkan mutu SDM aparatur pembina industri dan pedagang kecil dan menengah.⁴⁶

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyampaikan beberapa permasalahan dalam upaya pengembangan perindustrian ini yaitu: Masih kurangnya infrastruktur yang mampu menunjang pertumbuhan industri sehingga menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah; Belum optimalnya hubungan antara industri hulu dan hilir, baik pada skala besar, menengah maupun kecil; Belum optimalnya penggunaan potensi daerah oleh kegiatan industri; Masih lemahnya peranan industri kecil dan rumah tangga sehingga belum bisa dijadikan sebagai andalan bagi perekonomian daerah; Keterbatasan SDM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau baik berdasarkan kualitas maupun kuantitas; Rendahnya SDM pelaku usaha baik manajemen, permodalan, kewirausahaan dan akses pasar; Kurang optimalnya pengawasan terhadap sektor industri dan perdagangan; dan Kurangnya jaringan kerjasama dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau harus dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah direncanakan. Hal yang paling utama untuk segera dikembangkan adalah penyediaan infrastruktur untuk mempercepat mobilitas penduduk antar wilayah sehingga dapat menciptakan percepatan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, Pemerintah Kepulauan Riau harus segera mengidentifikasi kebutuhan sektor industri akan kompetensi tenaga kerja agar pelatihan yang diberikan kepada calon tenaga kerja dapat tepat sasaran dan dibutuhkan.

Terkait dengan birokrasi perizinan usaha yang berlaku saat ini, bisa dikatakan memang masih menjadi keluhan para calon investor, namun demikian, upaya mempercepat izin usaha ini akan terus dievaluasi dan segera dilakukan perbaikan untuk mempercepat pengeluaran izin tersebut. Diharapkan sistem perizinan kedepan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi yaitu dengan mengembangkan sistem perizinan baik untuk perizinan bekerja maupun perizinan keuar masuk barang. Sehingga para pengusaha industri tidak lagi memperlumahkan birokrasi perizinan yang memakan waktu dan bahkan dapat menimbulkan biaya yang tidak jelas.⁴⁸

Selama ini memang masih ditemui ada kendala dalam memperoleh visa atau pelayanan sehingga prosesnya agak terhambat. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi akan mempercepat proses pembuatan atau perpanjangan paspor dan izin kerja tenaga kerja asing di Batam lebih mudah. Apalagi saat ini sudah ada proses pembuatan dan perpanjangan via internet. Sementara untuk pengurusan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), ia paparkan, WNA yang bersangkutan cukup memberikan surat rekomendasi dari Apindo lalu mengurus (KITAS) ke kantor imigrasi Batam. Pertimbangan imigrasi dalam memberikan kebijakan memudahkan Apindo tidak lepas dari kewajiban Imigrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk Apindo selaku pengusaha. Kemudahan ini tetap tidak mengabaikan security. Selama ini kan mereka anggap perizinannya susah, padahal bukan karena SDMnya, tetapi memang peralatannya yang tidak memadai. Dengan komunikasi ini akan jadi lebih baik. Kemudahan memperoleh visa bisnis bagi para pengusaha akan diberlakukan sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kerjasama dengan pengusaha. Dengan kemudahan ini, ia harapkan kondisi dunia usaha Batam akan lebih kondusif bagi pengusaha.⁴⁹

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Mei 2010.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2011.

Penanggulangan permasalahan atau kendala perizinan ini harus menjadi prioritas Pemerintah daerah agar percepatan pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi yang produktif sesuai dengan yang ditargetkan di Kepulauan Riau dapat segera terealisasi.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung sektor industri:

Kebijakan mendesentralisir lokasi pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain. Kebijakan ini adalah memindahkan lokasi pabrik/plant ke daerah lain, mengingat bahwa tenaga kerja yang terserap dalam industri mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Bagian Timur.

Penetapan dan pemilahan zona kegiatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi daerah. Menetapkan cluster kegiatan ekonomi, beberapa kebijakan lain adalah Batam harus konsisten hanya pada sektor Industri dan Perdagangan. Pulau bintang konsentrasi dengan Pariwisata, Kabupaten Karimun dengan Pertanian, budidaya kelautan dan galangan kapal, serta Kabupaten Natuna dan Lingga dengan konsentrasi pada pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata

Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah kab/kota yang sebaran penduduknya minim seperti pembangunan jalan, pemukiman dan sarana transportasi.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan pembangunan sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan. Ketersediaan Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang merata dapat mencegah arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.

B. Saran

Pemerintah Kepulauan Riau perlu segera merealisasikan sistem perizinan yang berbasis teknologi informasi.

Untuk menambah ketertarikan investor untuk datang dan berinvestasi di provinsi Kepulauan Riau perlu segera menyiapkan infrastruktur terutama Jalan, energi listrik dan transportasi.

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan terus kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan pada perusahaan menengah dan besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hasibuan, Nurimansyah, (2000). "Ekonomi Industri, Persaingan, Monopoli dan Regulasi". LP3ES, Jakarta.
- Kartasapoetra G, (2000). "Makro Ekonomi", Edisi Kedua, Cetakan Keempat Belas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lincolyn Arsyad, (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE.

Publikasi

- Badan Pusat Statistik, Kepulauan Riau Dalam Angka 2010.
- Badan Pusat Statistik, (2008). "Publikasi Kriteria Industri Kecil", Provinsi Sumatera Utara.
- Laporan Ekonomi Bulanan Januari 2008, Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Artikel/Website

- Abidin, Said Zainal, Peran Pemerintah Dalam Pembangunan, <http://www.stialan.ac.id/artikel/SaidZaenal.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010.
- Bab 18 Daya Saing Industri Manufaktur hal 1-2. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8418/. Diakses pada tanggal 12 Maret 2010
- BI, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan I/2010, http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional/KER/KepRiau/ker_kepriau_tw110.htm, Diakses pada tanggal 9 Juli 2010.
- Firdausy Carunia Mulya, Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah, elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/.../downloadDataById/8198/8198.pdf,. Diakses pada tanggal 15 Maret 2010.
- Pertumbuhan Industri dalam RPJM Ditargetkan Capai 6,79%, http://www.depperin.go.id/ind/publikasi/berita_psb/2010/20102989.HTM. Diakses pada tanggal 18 Maret 2010.
- Ringkasan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, <http://www.depperin.go.id/kebijakan/03KPIN-Ringkasan.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2010
- Website resmi Provinsi Kepulauan Riau. www.kepriprov.go.id. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03./2009 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.